

**Petunjuk A: Pilih satu jawaban yang paling tepat**

1. Di bawah ini merupakan pokok kajian hukum tata negara, *kecuali*...
  - A. Bentuk dan penyusunan alat-alat perlengkapan negara
  - B. Wewenang, Fungsi, tugas, dan tanggung jawab dari masing-masing alat perlengkapan negara
  - C. Hubungan antara alat perlengkapan negara, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal
  - D. Hubungan antara warga negara dengan negara termasuk hak-hak asasi dari warga negara
  - E. Prinsip-prinsip hukum mengenai pelaksanaan dari tugas, wewenang, dan kewajiban negara tersebut
  
2. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, pada tanggal 16 Oktober 1945 diterbitkan maklumat wakil presiden No.X tahun 1945 untuk memberikan penguatan terhadap langkah-langkah demokratisasi pemerintah setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Isi dari maklumat tersebut antara lain...
  - A. KNIP disertai kekuasaan legislatif dan ikut serta membuat/ menetapkan GBHN sebelum terbentuk DPR dan MPR
  - B. Menetapkan DPRGR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong)
  - C. Menetapkan MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara)
  - D. Pembentukan delapan Provinsi
  - E. Kembali Kepada UUD 1945
  
3. Peradilan terhadap pemakzulan presiden dan atau wakil presiden dalam ketatanegaraan kita merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi. Alasan pemakzulan presiden dan atau wakil presiden dalam UUD 1945 adalah, *kecuali*...
  - A. Pelanggaran hukum berupa pengkhianatan negara
  - B. Melakukan korupsi dan kolusi
  - C. Melakukan tindak pidana berat
  - D. Melakukan perbuatan tercela lainnya
  - E. Tidak menghadiri undangan DPR dalam rapat pansus
  
4. Untuk melaksanakan tugas dan kegiatannya, parlemen biasanya dilengkapi dengan hak-hak sebagai berikut, *kecuali*...
  - A. Hak interpelasi dan pertanyaan
  - B. Hak penyelidikan terhadap kasus-kasus dugaan pelanggaran oleh pemerintah
  - C. Hak resolusi atau pernyataan pendapat
  - D. Hak mengingatkan atau memorandum
  - E. Hak kekebalan (imunitas)

5. Untuk menjamin pelaksanaan tugas dan hak-hak lembaga parlemen itu, maka pada setiap anggota parlemen biasanya diberikan hak-hak sebagai berikut, *kecuali...*
- Hak bertanya
  - Hak mengusulkan untuk dilaksanakannya hak-hak lembaga parlemen
  - Hak protokol
  - Hak mengingatkan / memorandum
  - Hak kekebalan/imunitas
6. Di bawah ini merupakan perbedaan objek kajian antara ilmu negara dengan hukum tata negara, yaitu ...
- Ilmu negara melakukan kajian negara yang masih abstrak. Hukum tata negara objek kajiannya adalah negara dalam pengertian konkrit.
  - Ilmu negara melakukan kajian negara dalam pengertian konkrit. Hukum tata negara melakukan kajian negara yang masih abstrak.
  - Ilmu negara dan hukum tata negara sama kajiannya, yaitu negara dalam keadaan konkrit.
  - Ilmu negara dan hukum tata negara mempunyai objek kajian yang sama.
  - Ilmu negara dan hukum tata negara objek kajiannya adalah negara tertentu.
7. Syarat-syarat untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah *Rule of Law* adalah sebagai berikut, *kecuali...*
- Perlindungan konstitusional
  - Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
  - Kebebasan untuk menyatakan pendapat
  - Pendidikan Kewarganegaran atau *civic education*
  - Adanya lembaga eksaminatif
8. Dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), maka fungsi negara adalah...
- Menjaga keamanan rakyat
  - Menjaga ketertiban rakyat
  - Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum warga negara
  - Melindungi hak-hak milik pribadi agar tidak diganggu orang lain
  - Menyediakan pelayanan dan kesejahteraan bagi sekelompok orang
9. Dalam ilmu hukum tata negara dikenal adanya prinsip *Freis ermessen*, yaitu...
- Kebebasan presiden untuk membuat segala peraturan
  - Kebebasan presiden untuk mengajukan rancangan undang-undang
  - Kebebasan presiden untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri
  - Kebebasan bagi pemerintah untuk memiliki ruang gerak yang

leluasa dalam usahanya mencapai tujuan pemerintahan

- E. Kebebasan presiden untuk melakukan *reshuffle* menteri dalam kabinetnya
10. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden ditujukan dalam rangka pelaksanaan fungsi DPR, yaitu fungsi...
- pengawasan
  - angket
  - anggaran
  - legislasi
  - interpelasi
11. Kekuasaan presiden sebagai kepala negara dalam bidang yudikatif antara lain adalah sebagai berikut, *kecuali*...
- memberikan Grasi
  - memberikan Abolisi
  - memberikan Amnesti
  - memberikan Rehabilitasi
  - memberikan gelar dan tanda jasa
12. Dalam pasal 22 ayat 1 dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak untuk menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang. Apabila Perpu tersebut tidak mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya, maka Perpu tersebut harus...
- Dicabut
  - Tetap diberlakukan karena keadaan genting dan memaksa
  - Tidak perlu dimintakan persetujuan DPR
  - Diganti
  - Didiamkan
13. Dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal dikenal adanya 4 macam asas penyelenggaraan sebagai berikut, *kecuali*...
- Desentralisasi
  - Konfederasi
  - Medebewind
  - Dekonsentrasi
  - Sentralisasi
14. Di bawah ini adalah kebaikan dari pelaksanaan asas desentralisasi, *kecuali*...
- Daerah termasuk rakyat yang ada di dalamnya menjadi subyek dalam pengambilan keputusan ditingkat lokal (daerah)
  - Dapat meringankan beban pemerintah pusat dalam mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan yang bersifat kedaerahan
  - Merupakan sarana yang tepat untuk melakukan pendidikan demokrasi tingkat lokal
  - Memberikan penilaian yang relatif bersifat tepat pada sifat yang berbeda-beda dari wilayah dan penduduk suatu negara
  - Membuka kemungkinan munculnya fanatisme daerah.

15. Pemerintahan lokal atau daerah di Indonesia diatur dalam Pasal 18 UUD 1945. Dari pasal 18 tersebut dapat disimpulkan beberapa hal di bawah ini, *kecuali...*
- Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan hal ini menegaskan bahwa pemerintahan daerah adalah pemerintahan otonomi dalam negara kesatuan Republik Indonesia.
  - Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak otonominya.
  - Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa (DIY, Aceh, otonomi khusus Papua).
  - Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan Umum.
  - Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya termasuk dalam hal politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.
16. Yang bukan merupakan hak-hak daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah...
- menyelenggarakan kebijakan di bidang pertahanan dan keamanan
  - mengelola kekayaan daerah
  - memungut pajak daerah dan retribusi
  - mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya di daerah
  - mendapatkan sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah
17. UUDS tahun 1950 yang pernah berlaku di Indonesia bersifat sementara. Hal ini terlihat jelas dalam rumusan pasal 134 yang berisi...
- Konstituante bersama-sama pemerintah segera menyusun UUD Republik Indonesia yang akan menggantikan UUDS 1950
  - Ketentuan tanggal berakhirnya pemberlakuan UUDS
  - UUDS akan segera diganti dengan KRIS
  - Pernyataan kembali ke UUD 1945 yang menggantikan UUDS
  - UUDS 1950 hanya berlaku sampai jangka waktu tahun 1959
18. Dekrit presiden 5 Juli 1959 berisi antara lain, *kecuali...*
- Membubarkan konstituante
  - Pemberlakuan kembali UUD 1945
  - Tidak berlakunya UUDS 1950
  - Pembentukan MPRS dan DPAS
  - Pergantian sistem parlementer ke sistem presidensial
19. Salah satu latar belakang dikeluarkannya dekrit presiden 5 Juli 1959 adalah...
- Kegagalan konstituante untuk menyusun Undang-undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan UUDS 1950

- B. Keinginan Presiden Soekarno untuk menjalankan demokrasi terpimpin
- C. Adanya resesi ekonomi, sehingga menimbulkan inflasi yang sangat tinggi
- D. Perubahan sistem pemerintahan
- E. Jatuh banggunya kabinet parlementer
20. Salah satu gagasan untuk menjadikan MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara tetapi merupakan lembaga negara karena...
- A. Untuk mereduksi kekuasaan MPR
- B. Agar presiden mempunyai kedudukan yang setara dan sejajar dengan MPR
- C. Bahwa MPR bukan satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat, sehingga setiap lembaga yang mengemban tugas-tugas politik negara dan pemerintahan (kecuali kekuasaan kehakiman) adalah pelaksana kedaulatan rakyat dan harus tunduk dan bertanggung jawab kepada rakyat
- D. Dalam sistem ketatanegaraan terdiri dari tri cameral, yaitu MPR, DPR dan DPD
- E. Kekuasaan MPR, DPR, presiden, DPD adalah sama dan sejajar sehingga presiden tidak dapat diberhentikan oleh lembaga-lembaga negara tersebut termasuk MPR dan DPR
21. Di bawah ini adalah mekanisme perubahan UUD 1945 yang diatur dalam pasal 37, kecuali...
- A. Usul perubahan pasal-pasal UUD 1945 dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR
- B. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya
- C. Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR
- D. Putusan untuk mengubah pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR
- E. MPR dapat melakukan perubahan dalam semua pasal-pasal UUD termasuk mengenai bentuk negara
22. Dari perubahan pasal 5 dan pasal 20 UUD 1945 terjadi perubahan yang signifikan dalam fungsi legislasi, yaitu...
- A. Kekuasaan membentuk UU ada di tangan DPR
- B. DPR hanya berhak untuk mengajukan rancangan undang-undang
- C. Kekuasaan membentuk undang-undang ada di tangan DPR

- D. Presiden tidak mempunyai hak untuk mengajukan rancangan Undang-Undang
- E. Kekuasaan membentuk UU ada di tangan DPR, MPR, dan DPD
23. Baru-baru ini DPR menggunakan hak angketnya dalam kasus Bank Century dengan membentuk pansus Bank Century, hak angket ini menunjang salah satu fungsi dari DPR, yaitu fungsi...
- Legislasi
  - Pengawasan
  - Budgeter
  - Memorandum
  - Impeachment*
24. DPR mempunyai kekuasaan untuk memilih anggota BPK dengan memperhatikan saran dari...
- MPR
  - Presiden
  - DPD
  - Menteri keuangan
  - MA
25. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan dari...
- DPR
  - MPR
  - MA
  - Menteri Kehakiman
  - Jaksa Agung
26. Di bawah ini merupakan tugas dari Komisi Yudisial, *kecuali*...
- Melakukan pendaftaran calon hakim agung
  - Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung
  - Menetapkan calon hakim agung
  - Mengajukan calon hakim agung ke DPR
  - Mengangkat hakim-hakim di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi
27. Di bawah ini adalah lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung seperti yang tersurat dalam pasal 24 ayat 2, *kecuali*...
- Peradilan Umum
  - Peradilan Agama
  - Peradilan Militer
  - Peradilan Tata Usaha Negara
  - Peradilan Anak
28. Ketentuan tentang Pemilu diatur dalam Pasal 22 E UUD 1945, dimana penyelenggara pemilu dilakukan oleh...
- Suatu Komisi pemilihan Umum Nasional (KPU)
  - Menteri Dalam Negeri
  - DPR
  - Daerah otonom
  - Sekretaris daerah
29. Perubahan UUD 1945 pasal 30 ayat 3 dan ayat 4 membawa perubahan mengenai pemisahan tugas TNI dan POLRI, yaitu...
- TNI dan POLRI bersama-sama menjaga keutuhan dan kedaulatan negara.
  - TNI dan POLRI bertugas mengayomi dan melindungi masyarakat.

- C. TNI bertugas menjaga keutuhan dan kedaulatan negara, POLRI bertugas mengayomi dan melindungi masyarakat.
- D. POLRI bertugas menjaga keutuhan dan kedaulatan negara, TNI bertugas mengayomi dan melindungi masyarakat.
- E. POLRI dan TNI bersama-sama bertugas menjaga keutuhan dan kedaulatan negara, menegakkan hukum dan melayani masyarakat.

30. UU yang mengatur tentang Tentara Nasional Indonesia adalah...

- A. UU No.34 tahun 2004
- B. UU No.32 tahun 2004
- C. UU No.23 tahun 2004
- D. UU No.25 tahun 2004
- E. UU No.2 tahun 2002

31. 1. UUD 1945

- 2. Undang-undang/Peraturan pemerintah pengganti UU
- 3. Peraturan pemerintah
- 4. Keputusan presiden
- 5. Peraturan presiden
- 6. Peraturan daerah
- 7. PERDES

Hierarki peraturan perundang-undangan menurut UU No.10 tahun 2004 adalah...

- A. 1, 2, 3, 5, 6
- B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- C. 1, 2, 3, 5, 7
- D. 1, 2, 3, 4, 6, 7
- E. 1, 2, 5, 4, 7

32. Materi muatan peraturan pemerintah berisi...

- A. Sama dengan materi muatan undang-undang
- B. Materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya
- C. Materi untuk melaksanakan peraturan presiden
- D. Materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah
- E. Materi untuk melaksanakan keputusan presiden

33. Pada hakikatnya, materi muatan Perpu sama dan sederajat dengan undang-undang, tetapi yang membedakannya adalah dalam hal...

- A. Pembentukannya
- B. Masa berlakunya
- C. Pengesahannya
- D. Rancangannya
- E. Ketentuan pemaksanya

34. Salah satu asas penting dalam negara hukum adalah adanya asas legalitas, dalam asas legalitas menghendaki...

- A. Agar setiap tindakan badan/pejabat administrasi berdasarkan undang-undang
- B. Agar setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum
- C. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku
- D. Negara berdasarkan atas hukum

- E. Pemerintahan yang berkuasa harus mempunyai dasar legitimasi yang kuat
35. Paham kedaulatan rakyat secara tegas dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945 alinea...
- Satu
  - Dua
  - Tiga
  - Empat
  - Dua dan empat
36. Makna prinsip negara kesatuan dalam ketatanegaraan Indonesia yang dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 1 antara lain...
- Memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah pemerintahan pusat
  - Wilayah-wilayah di Indonesia merupakan wilayah yang independen
  - Daerah istimewa mempunyai sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berbeda dengan wilayah lainnya dan tidak tunduk pada pemerintah pusat
  - Pemerintahan pusat memegang kekuasaan otoriter atas daerah-daerah
  - Daerah tidak mempunyai hak untuk mengurus wilayahnya sendiri
37. Aspek perimbangan kekuasaan mengenai hubungan Presiden dan DPR, Presiden dan Mahkamah Agung tampak dalam pasal...
- Pasal 13
  - Pasal 14
  - Pasal 13 dan 14
  - Pasal 13 dan 15
  - Pasal 15
38. Nilai-nilai yang harus terkandung dalam suatu konstitusi negara salah satunya adalah nilai normatif. Nilai normatif adalah...
- Bagi suatu bangsa konstitusi itu bukan saja berlaku dalam arti hukum, tetapi juga merupakan suatu kenyataan (*reality*)
  - Dalam hal ini konstitusi menurut hukum memang berlaku tetapi kenyataannya tidak sempurna
  - Konstitusi itu secara hukum tetap berlaku, tetapi dalam kenyataannya hanya sekadar untuk memberi bentuk dari tempat yang telah ada dan untuk melaksanakan kekuasaan politik
  - Konstitusi haruslah dipatuhi sebagai hukum yang berlaku
  - Konstitusi mengharuskan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.
39. Di bawah ini adalah lembaga-lembaga yang ada di Indonesia setelah amandemen UUD 1945, kecuali...
- MPR
  - DPR
  - DPA
  - MK (Mahkamah Konstitusi)
  - DPD (Dewan Perwakilan Daerah)

40. Di bawah ini adalah sumber hukum formil dari hukum tatanegara Indonesia, *kecuali...*
- Pancasila
  - Perundang-undangan
  - Yurisprudensi
  - Kebiasaan
  - Doktrin
41. Yang merupakan sumber hukum material dari hukum tata negara Indonesia adalah...
- Pancasila
  - Perundang-undangan
  - Yurisprudensi
  - Kebiasaan
  - Doktrin
42. Substansi utama yang harus terkandung dalam sebuah konstitusi antara lain, *kecuali...*
- Terjaminnya perlindungan HAM
  - Pemisahan kekuasaan
  - Legalitas pemerintah
  - Peradilan yang bebas
  - Sistem pemerintahan presidensial
43. Di bawah ini adalah bentuk peraturan perundang-undangan pada masa penjajahan Belanda pada waktu berlakunya IS (*Indische Staatsregeling*) adalah...
- Wet*
  - Algemene Maatsregelen van Bestuur*
  - Ordonantie*
  - Regering Verordeningen*
  - Tap MPR
44. Dalam teori hukum tata negara dikenal adanya empat cara untuk mengubah atau memperlakukan suatu UUD (konstitusi) yaitu seperti di bawah ini, *kecuali...*
- Dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif dengan pembatasan-pembatasan tertentu
  - Dilakukan melalui referendum
  - Dilakukan oleh sejumlah negara negara-negara bagian
  - Dilakukan dalam suatu konvensi atau suatu lembaga-lembaga khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan konstitusi
  - Dilakukan oleh pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif
45. Yang dimaksud dengan referendum adalah...
- Suatu kegiatan untuk memilih para anggota parlemen
  - Suatu kegiatan politik yang dilakukan oleh rakyat untuk memberikan keputusan menolak atau setuju terhadap kebijakan yang diambil oleh parlemen
  - Suatu kegiatan politik yang dilakukan oleh rakyat, manakala presiden menyimpang dari konstitusi dan rakyat punya hak untuk melakukan *impeachment*
  - Suatu kegiatan politik rakyat yang dilakukan untuk menjatuhkan parlemen
  - Suatu kegiatan politik rakyat yang dilakukan untuk menjatuhkan kabinet

46. Contoh negara yang melaksanakan praktek referendum dalam mengontrol jalannya pemerintahan adalah...
- A. Amerika                      D. Perancis  
B. Inggris                        E. Swiss  
C. Malaysia
47. Referendum Obligator wajib dilakukan manakala...
- A. Meminta pendapat secara langsung terhadap suatu rancangan undang-undang yang akan diundangkan  
B. Meminta pendapat secara langsung kepada rakyat tentang setuju atau tidaknya terhadap undang-undang yang sudah berlaku, tetapi sementara ada sebagian rakyat yang menggugat  
C. Meminta pendapat secara langsung kepada rakyat tentang setuju atau tidaknya terhadap rancangan undang-undang federal  
D. Meminta pendapat secara langsung pada rakyat manakala terjadi pergantian kabinet  
E. Meminta pendapat secara langsung pada rakyat apabila presiden melanggar hukum
48. Teori *Stufenbau des Rechts* (disebut juga *Stufenbautheorie* atau teori hierarki norma hukum dari Kelsen mempunyai makna bahwa...
- A. bahwa norma-norma (termasuk norma hukum) itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya  
B. bahwa norma-norma (termasuk norma hukum) itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma tidak diatur menurut tinggi rendahnya  
C. Norma-norma itu merupakan satu kesatuan sistem  
D. Satu norma dengan norma yang lainnya saling mengabaikan  
E. Norma yang khusus mengenyampingkan norma umum
49. Suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif disebut...
- A. *Grundnorm* (norma dasar)  
B. Norma hukum  
C. Norma agama  
D. Norma kesopanan  
E. Norma kesusilaan
50. Di bawah ini merupakan alat kelengkapan DPD, *kecuali*...
- A. Pimpinan  
B. Panitia *ad hoc*  
C. Badan kehormatan  
D. Panitia-panitia lain yang diperlukan  
E. Panitia pengawas
51. Dalam sistem ketatanegaraan kita pasca amandemen UUD 1945, perubahan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden diatur dalam pasal...

- A. Pasal 4                      D. Pasal 7  
 B. Pasal 5                      E. Pasal 8  
 C. Pasal 6
52. Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan dengan cara...
- A. Dipilih oleh MPR  
 B. Dipilih oleh DPD dan MPR  
 C. Dipilih oleh DPR dan MPR  
 D. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung dalam pemilihan yang terpisah  
 E. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam suatu pasangan secara langsung oleh rakyat
53. Ketentuan mengenai presiden tidak dapat membubarkan atau membekukan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam...
- A. Pasal 6 UUD 1945  
 B. Pasal 7c UUD 1945  
 C. Pasal 7a UUD 1945  
 D. Pasal 8a UUD 1945  
 E. Pasal 9
54. Dalam sistem ketatanegaraan kita, presiden berhak membubarkan DPR. Hal ini terjadi dalam praktek ketatanegaraan kita pada waktu berlakunya...
- A. KRIS  
 B. UUDS 1950  
 C. UUD 1945 pada awal kemerdekaan  
 D. UUD 1945 pasca amandemen  
 E. Dekrit presiden 5 Juli 1959
55. Sejalan dengan era reformasi, maka muncul beberapa lembaga-lembaga khusus yang bersifat independen yang tidak diatur dalam UUD 1945 antara lain seperti di bawah ini, *kecuali*...
- A. Komisi Yudisial  
 B. Komisi Pemilihan Umum  
 C. Komisi Ombudsman  
 D. Komisi Pemberantasan Korupsi  
 E. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
56. Di bawah ini adalah lembaga-lembaga negara yang pernah ada di Hindia Belanda pada masa penjajahan Belanda, *kecuali*...
- A. Eksekutif  
 B. Legislatif  
 C. Yudikatif  
 D. Auditif  
 E. KNIP
57. Lembaga legislatif pada masa Hindia Belanda dinamakan...
- A. KNIP  
 B. Gubernur jenderal  
 C. Volksraad  
 D. Hoogerechtshof  
 E. Algemene rekenkamer
58. Semua produk hukum tertulis yang berisi norma yang bersifat mengatur (*regeling*) dalam ilmu tata negara disebut...
- A. Peraturan perundang-undangan  
 B. Yurisprudensi  
 C. Norma  
 D. Doktrin  
 E. Konvensi

59. Van Vollenhoven membagi fungsi kekuasaan ke dalam empat fungsi (biasa dikenal dengan catur praja) seperti di bawah ini, *kecuali...*
- regeling
  - bestuur
  - rechspraak
  - politie
  - yudikatif
60. Dalam pembagian kekuasaan menurut Van Vollen Hoven tersebut di atas, yang merupakan fungsi untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat (*social order*) dan peri kehidupan bernegara adalah...
- regeling
  - bestuur
  - rechspraak
  - politie
  - yudikatif
61. Doktrin mengenai pemisahan kekuasaan yang diajarkan oleh Montesquie dalam memahami sistem ketatanegaraan negara Inggris terdapat dalam bukunya yang berjudul...
- L'esprit des Lois
  - Second Treaties of Civil Government
  - Constitutional Theory
  - Constitutional Democracy
  - Wet en wetboeken
62. Di bawah ini merupakan tujuan dari diselenggarakannya pemilihan umum, *kecuali...*
- untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai
  - untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan
  - untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat
  - untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara
  - untuk mempertahankan status quo
63. Sistem pemerintahan menurut UUD 1945, sistem kabinet bukan lagi sistem presidensial tetapi sistem kabinet parlementer dimana kabinet yang baik secara perorangan maupun kolektif bertanggung jawab kepada parlemen setelah keluarnya...
- PP No.3 tahun 1945
  - Maklumat Wakil Presiden No.X tanggal 14 November 1945
  - Perpu No.3 tahun 1945
  - Pertanggungjawaban Presiden RI
  - Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945
64. Di bawah ini adalah prinsip-prinsip yang dianut dalam sistem presidensial, *kecuali...*
- kepala negara menjadi kepala pemerintahan
  - pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen (DPR)
  - menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden
  - eksekutif dan legislatif sama kuatnya
  - kedudukan eksekutif lebih rendah (tergantung pada parlemen)
65. Di bawah ini adalah prinsip-prinsip yang dianut dalam sistem parlementer, *kecuali...*

- A. Kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala negara
- B. Pemerintah dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri
- C. Kabinet bertanggung jawab kepada dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi
- D. Kedudukan eksekutif lebih rendah dan tergantung pada parlemen
- E. Eksekutif dan legislatif sama kuatnya
66. Dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia pada waktu berlakunya Konstitusi RIS, kita menggunakan sistem pemerintahan...
- A. parlementer
- B. presidensial
- C. semi parlementer
- D. quasi presidensial
- E. presidensial tidak murni
67. Pengajuan permintaan pemberhentian presiden yang dilakukan oleh DPR harus memenuhi persyaratan seperti dalam pasal 7B ayat 3 UUD 1945, yaitu...
- A. Didukung sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  jumlah anggota DPR
- B. Didukung sekurang-kurangnya  $\frac{1}{3}$  dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  jumlah anggota DPR
- C. Didukung sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  ditambah satu dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  jumlah anggota DPR
- D. Didukung sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  jumlah anggota DPR
- E. Didukung sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  ditambah satu jumlah anggota DPR
68. Di bawah ini adalah kekuasaan presiden dalam bidang legislatif antara lain...
- A. menetapkan peraturan pemerintah sebagai tata cara untuk menjalankan undang-undang
- B. memberikan abolisi
- C. menyatakan perang dan keadaan damai
- D. memberikan gelaran dan tanda jasa
- E. memberikan restitusi
69. Di bawah ini adalah kekuasaan presiden yang terkait dengan tugas selaku kepala pemerintahan, kecuali...
- A. kekuasaan membuat undang-undang yang meliputi kekuasaan mempersiapkan dan mengusulkan pembentukan undang-undang dan menetapkan undang-undang

- B. kekuasaan menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang
- C. kekuasaan menetapkan peraturan pemerintah
- D. kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara
- E. kekuasaan mengangkat duta dan konsul
70. Pembuat undang-undang dasar mengatur secara rinci beberapa macam substansi yang harus ditetapkan dalam bentuk undang-undang. Substansi yang harus ditetapkan dengan undang-undang adalah seperti di bawah ini, *kecuali*...
- A. menyatakan keadaan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain
- B. menetapkan syarat-syarat dan akibat negara dalam keadaan bahaya dalam bentuk undang-undang
- C. menetapkan dan menyusun anggaran pendapatan negara dan belanja negara yang dimintakan persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
- D. menetapkan segala macam pajak untuk keperluan negara dengan undang-undang
- E. penetapan dan pengangkatan duta dan konsul
71. Seperti yang tertuang dalam pasal 20 ayat 2 UUD 1945 dalam melaksanakan fungsinya DPR mempunyai hak angket. Yang dimaksud dengan hak angket adalah...
- A. hak untuk melakukan penyelidikan
- B. hak untuk menyatakan pendapat
- C. hak untuk memperoleh protokoler
- D. hak untuk mengusulkan pemberhentian presiden
- E. hak untuk meminta keterangan secara langsung kepada presiden tentang suatu kebijakan (*policy*)
72. DPR juga mempunyai hak interpelasi. Hak interpelasi adalah...
- A. hak untuk melakukan penyelidikan
- B. hak untuk menyatakan pendapat
- C. hak untuk memperoleh protokoler
- D. hak untuk mengusulkan pemberhentian presiden
- E. hak untuk meminta keterangan secara langsung kepada presiden tentang suatu kebijakan (*policy*)
73. Di bawah ini adalah syarat-syarat pemberhentian anggota DPR yang diatur dalam pasal 22B, *kecuali*...
- A. apabila tidak lagi memenuhi syarat keanggotaan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang
- B. melakukan perbuatan melanggar hukum (pidana) dengan kualifikasi tertentu, misalnya kejahatan dengan ancaman pidana tertentu
- C. melakukan perbuatan tercela seperti misalnya mabuk, berjudi,

- melakukan perbuatan yang bertentangan dengan rasa kesusi-  
laan umum
- D. tidak memenuhi kewajiban yang baik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- E. apabila tidak menghadiri sidang paripurna DPR tanpa pemberitahuan selama 2 kali berturut-turut
74. Badan legislatif menurut Konstitusi RIS adalah...
- A. DPR
- B. Senat
- C. DPR dan Senat
- D. KNIP
- E. MPRS
75. Jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, maka pelaksana tugas kepresidenan dilakukan oleh...
- A. menteri luar negeri
- B. menteri dalam negeri
- C. menteri pertahanan
- D. menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan
- E. menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri perekonomian
76. Sesudah reformasi nasional, diadakan pemisahan yang tegas antara kedudukan dan peran TNI dan POLRI yang ditetapkan dengan...
- A. TAP MPR No.VI/MPR/2000
- B. TAP MPR No.VII/MPR/2000
- C. TAP MPR No.VIII/MPR/2000
- D. TAP MPR No.VI/MPR/2001
- E. TAP MPR No.VII/MPR/2001
77. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia di bawah ini adalah konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, *kecuali*...
- A. UUD 1945 yang berlaku antara 17 Agustus 1945—27 Desember 1949
- B. KRIS
- C. UUD 1950
- D. UUD 1945 yang berlaku sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959
- E. UUD 1945 yang berlaku pada masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat
78. Di bawah ini adalah ciri-ciri dari negara hukum dari kalangan Eropa kontinental menurut F.J Stahl, *kecuali*...
- A. Pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia
- B. Pemisahan kekuasaan negara
- C. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
- D. Adanya peradilan administrasi negara
- E. Kedudukan yang sama di depan hukum
79. Menurut K.C Where, konstitusi dapat diklasifikasikan dalam konstitusi rigid dan konstitusi fleksibel. Konstitusi rigid jika...
- A. memiliki prosedur perubahan yang sulit

- B. memiliki prosedur perubahan yang mudah
- C. prosedur perubahan konstitusi sama dengan undang-undang
- D. konstitusi tersebut tidak dapat diubah
- E. konstitusi tersebut tidak dapat diganggu gugat
80. Di bawah ini merupakan kehidupan politik rakyat (infrastruktur politik), *kecuali...*
- A. partai politik
- B. golongan kepentingan
- C. golongan penekan
- D. lembaga-lembaga negara
- E. alat komunikasi politik
81. Dalam pola pengisian lembaga perwakilan rakyat, maka untuk menentukan anggota perwakilan rakyat dapat digolongkan ke dalam dua sistem, yaitu sistem pemilihan organis dan sistem pemilihan mekanis. Sistem pemilihan mekanis adalah...
- A. mengisi keanggotaan lembaga perwakilan rakyat melalui pengangkatan atau penunjukan
- B. mengisi keanggotaan lembaga perwakilan rakyat melalui pemilu
- C. mengisi keanggotaan lembaga perwakilan rakyat melalui partai politik
- D. mengisi keanggotaan lembaga perwakilan rakyat melalui perintah presiden
- E. mengisi keanggotaan lembaga perwakilan rakyat melalui penunjukan kepala daerah
82. Ketentuan UUD 1945 yang mengatur keberadaan DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia dimaksudkan untuk hal berikut, *kecuali...*
- A. memperkuat ikatan-ikatan daerah dalam wadah NKRI
- B. memperteguh persatuan dan kebangsaan seluruh daerah
- C. meningkatkan agregasi dan akomodasi kepentingan daerah dalam perumusan kebijakan nasional
- D. mendorong percepatan demokrasi, pembangunan, dan kemajuan daerah
- E. menciptakan wakil-wakil daerah yang mampu membela kepentingan daerahnya sendiri di tingkat nasional
83. Berdasarkan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, Indonesia pernah berbentuk negara serikat, yaitu pada waktu berlakunya...
- A. UUD 1945 yang berlaku antara 17 Agustus 1945—27 Desember 1949
- B. KRIS
- C. UUD 1950
- D. UUD 1945 yang berlaku sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959
- E. UUD 1945 pasca amandemen
84. Badan Pemeriksa Keuangan pada zaman Hindia Belanda dinamakan...
- A. Volksraad
- B. Hoogerechtshof
- C. Algemene Rekenkamer
- D. Raad Van Rekenkamer
- E. KNIP

85. Laporan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK harus dilaporkan kepada...
- DPR, DPD, DPRD sesuai dengan kewenangannya
  - MPR
  - Presiden
  - Menteri Keuangan
  - Menteri Perekonomian
86. Maklumat Wakil Presiden No.X tahun 1945 merupakan saat lahirnya DPR setelah Indonesia merdeka, hal ini dikarenakan...
- maklumat tersebut mengubah status KNIP menjadi badan yang menjalankan tugas-tugas legislatif
  - maklumat tersebut mengubah sistem pemerintahan menjadi parlementer
  - dengan maklumat tersebut, tugas KNIP hanya semata-mata membantu presiden
  - maklumat tersebut membentuk MPRS dan DPAS
  - maklumat tersebut membentuk DPRGR
87. Apabila sebuah rancangan undang-undang tidak mendapatkan persetujuan bersama, maka...
- racangan tersebut dimajukan dalam persidangan berikutnya
  - racangan tersebut dapat langsung diundangkan oleh presiden
  - racangan tersebut tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan berikutnya
  - racangan tersebut langsung berlaku sebagai undang-undang
  - menunggu sampai mendapat persetujuan bersama
88. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama apabila dalam waktu tiga puluh hari tidak disahkan oleh presiden, maka...
- racangan undang-undang tersebut tidak boleh dimajukan dalam persidangan berikutnya
  - racangan tersebut tidak berlaku
  - racangan tersebut harus diubah
  - racangan tersebut sah dan wajib diundangkan
  - racangan tersebut harus ditinjau ulang
89. Dikeluarkannya perpu selain harus ada hal ihwal kegentingan yang memaksa, maka perlu juga diadakan pembatasan tentang pembentukan perpu, yaitu...
- Perpu dapat diterbitkan dalam segala hal
  - Perpu hanya dapat dibuat apabila DPR sedang tidak bersidang atau reses
  - Perpu dapat diterbitkan diluar hal-hal yang menyangkut administrasi negara (bidang pemerintahan)
  - Perpu dapat diterbitkan apabila rancangan undang-undang tidak disetujui oleh DPR
  - Perpu dapat diterbitkan apabila DPR dan Presiden tidak memperoleh kata sepakat
90. Pembuatan perpu tanpa ada hal ikhwal kegentingan yang memaksa adalah batal demi hukum, karena...



- B. hak untuk mengatur daerahnya sendiri dengan seluas-luasnya dan sebebaskan-bebasnya
- C. hak untuk mengangkat dan memilih pimpinan daerah yang berasal dari putra daerah
- D. hak untuk menerapkan kebijakan daerah dan urusan daerah yang berbeda dengan daerah lain
- E. hak penduduk daerah untuk mengatur dan mengurus serta mengembangkan urusan daerahnya sendiri tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku
97. Sumber pendapatan asli daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi daerah berasal dari, *kecuali*...
- A. pajak daerah
- B. retribusi
- C. laba BUMD dan hasil pengelolaan kekayaan lainnya
- D. lain-lain PAD yang sah
- E. dana perimbangan
98. Hadirnya DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia diatur dalam...
- A. pasal 22c dan 22d UUD 1945
- B. pasal 21 UUD 1945
- C. pasal 24 UUD 1945
- D. pasal 221 dan 22b UUD 1945
- E. pasal 25 UUD 1945
99. Pada waktu Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer, maka dibentuklah kabinet parlementer pertama di bawah pimpinan...
- A. Sutan Syahrir
- B. Amir Syarifudin
- C. Ir. Soekarno
- D. Moh. Hatta
- E. Amir Wilopo
100. Pemilu pertama yang diselenggarakan setelah Indonesia merdeka pada tahun...
- A. 1955
- B. 1956
- C. 1957
- D. 1960
- E. 1965
101. Fungsi presiden menurut UUD 1945 meliputi, kecuali...
- A. sebagai kepala negara
- B. sebagai kepala eksekutif memimpin kabinet
- C. sebagai panglima tertinggi angkatan darat, laut, dan udara
- D. sebagai pemimpin dalam perumusan kebijakan luar negeri
- E. sebagai pemimpin dan perumus dalam masalah peradilan di Indonesia
102. Istilah republik berasal dari bahasa latin *res publica* yang artinya...
- A. kepentingan umum
- B. kepentingan negara
- C. kepentingan golongan
- D. kepentingan presiden
- E. kepentingan beberapa orang
103. Contoh negara yang menerapkan sistem republik antara lain, *kecuali*...
- A. Indonesia
- B. Filipina

- C. Inggris  
D. Amerika Serikat  
E. Jerman
104. MPR setelah amandemen UUD 1945 merupakan lembaga bicameral yang terdiri dari...
- A. DPR dan DPD  
B. DPR dan DPA  
C. DPD dan DPA  
D. DPR dan MK  
E. DPR dan Komisi Yudisial
105. Berdasarkan Pasal 1 UUD 1945, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh...
- A. MPR  
B. DPR  
C. UUD  
D. DPD  
E. DPR dan MPR
106. Salah satu perubahan dalam pasal 31 UUD 1945 pasca amandemen adalah ditetapkannya anggaran pendidikan minimal...
- |         |         |
|---------|---------|
| A. 20 % | D. 15 % |
| B. 30%  | E. 10 % |
| C. 40%  |         |
107. United Nations Development Program (UNDP) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan negara yang baik adalah sebagai berikut, *kecuali*...
- A. partisipasi  
B. transparansi  
C. akuntabel  
D. penegakan hukum  
E. melayani sebagian kelompok mayoritas
108. Dalam sistem pemerintahan Indonesia periode 18 Agustus 1945—27 Desember 1949, sebelum terbentuknya MPR, DPR, DPA, BPK dan MA terbentuk segala kekuasaan dijalankan oleh...
- A. Presiden  
B. Komite Nasional  
C. Presiden dengan dibantu komite nasional  
D. DPRGR  
E. MPRS
109. Di negara kita, konvensi memiliki fungsi yang penting yaitu untuk...
- A. menggeser pasal tertentu dalam UUD 1945 yang sudah tidak relevan  
B. untuk melaksanakan ketentuan pasal-pasal UUD 1945  
C. melengkapi hukum yang berlaku di Indonesia  
D. memudahkan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara  
E. mengisi kekosongan hukum selama tidak bertentangan dengan UUD 1945
110. Yang dimaksud dengan sengketa kewenangan antarlembaga negara adalah...
- A. klaim antara lembaga negara yang satu dan yang lainnya mengenai kedudukan yang dimiliki masing-masing lembaga negara tersebut  
B. klaim antara lembaga negara yang satu dan yang lainnya



- B. kondisi kehidupan dan dinamika masyarakat berubah dari waktu ke waktu
- C. perubahan aspirasi dan dinamika juga dimungkinkan berubah karena penambahan penduduk
- D. menjamin terjadinya pergantian pimpinan dari waktu ke waktu
- E. untuk menghabiskan dana pemilu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah
- 116.** Lembaga yang berwenang untuk menyatakan pembubaran partai politik adalah...
- A. KPU
- B. Presiden
- C. Pemerintah
- D. Menteri Dalam Negeri
- E. Mahkamah Konstitusi
- 117.** Apabila terdapat perbedaan hasil Pemilu sehingga menimbulkan sengketa hasil pemilihan umum, maka diselesaikan oleh...
- A. Mahkamah Konstitusi
- B. Mahkamah Agung
- C. KPU
- D. KPUD
- E. DPR
- 118.** Yang merupakan salah satu pelaksanaan hak budget yang dimiliki oleh DPR yaitu...
- A. melakukan kontrol terhadap penentuan sumber dan pendapatan belanja negara untuk waktu satu tahun
- B. melakukan kontrol terhadap penentuan sumber dan pendapatan belanja daerah untuk waktu satu tahun
- C. melakukan kontrol dan pengawasan terhadap biaya perjalanan dinas presiden
- D. melakukan kontrol dan pengawasan terhadap biaya perjalanan dinas para menteri
- E. melakukan kontrol dan pengawasan terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh pejabat negara
- 119.** Kewenangan mutlak presiden untuk mengangkat dan memberhentikan para pejabat publik disebut dengan hak...
- A. legislatif
- B. yudikatif
- C. prerogatif
- D. amnesti
- E. rehabilitasi
- 120.** Lembaga yang berwenang untuk melakukan pengujian materi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah...
- A. Mahkamah Konstitusi
- B. Komisi Yudisial
- C. Mahkamah Agung
- D. DPR
- E. Kehakiman

# Kunci Jawaban Tes Kemampuan Dasar

Paket  
1

## PANCASILA

1. E	21. A	41. A
2. E	22. D	42. C
3. D	23. E	43. B
4. E	24. C	44. A
5. E	25. A	45. E
6. D	26. C	46. D
7. C	27. B	47. A
8. C	28. A	48. C
9. C	29. A	49. D
10. B	30. C	50. C
11. A	31. E	51. A
12. D	32. B	52. E
13. E	33. B	53. C
14. B	34. A	54. B
15. C	35. E	55. D
16. C	36. C	56. E
17. E	37. E	57. B
18. C	38. B	58. C
19. C	39. E	59. B
20. B	40. D	60. C

Paket  
2

## UUD 1945

1. A	21. A	41. A
2. D	22. D	42. B
3. A	23. C	43. C
4. D	24. A	44. C
5. A	25. A	45. A
6. B	26. A	46. C
7. A	27. A	47. D
8. A	28. E	48. C
9. A	29. A	49. A
10. B	30. D	50. D
11. A	31. B	51. E
12. D	32. E	52. D
13. B	33. A	53. C
14. A	34. C	54. E
15. D	35. A	55. B
16. A	36. E	56. A
17. A	37. A	57. C
18. A	38. D	58. C
19. A	39. B	59. E
20. B	40. B	60. E

Paket  
3

## TATA NEGARA

1. E	19. A	37. C	55. A	73. E	91. A	109. E
2. A	20. C	38. A	56. E	74. C	92. A	110. B
3. E	21. E	39. C	57. F	75. D	93. E	111. C
4. E	22. A	40. A	58. A	76. A	94. D	112. A
5. D	23. B	41. A	59. E	77. E	95. C	113. A
6. A	24. C	42. E	60. D	78. E	96. A	114. E
7. E	25. A	43. E	61. E	79. A	97. E	115. E
8. C	26. E	44. E	62. E	80. D	98. A	116. A
9. D	27. E	45. B	63. E	81. B	99. A	117. A
10. A	28. A	46. E	64. E	82. E	100. A	118. A
11. E	29. C	47. A	65. E	83. B	101. E	119. C
12. A	30. A	48. A	66. A	84. D	102. A	120. C
13. B	31. A	49. A	67. A	85. A	103. C	
14. E	32. B	50. E	68. A	86. A	104. A	
15. E	33. A	51. C	69. E	87. C	105. C	
16. A	34. A	52. E	70. E	88. D	106. A	
17. A	35. D	53. B	71. A	89. B	107. E	
18. E	36. A	54. B	72. E	90. A	108. C	